



RUANG PUBLIK DAN AGENSI PEREMPUAN DALAM DIALOG ANTARAGAMA: Pendekatan Feminis Sosiokultural di Palangka Raya

Sharon Michelle O. Pattiasina¹, Jinny Ningsih², Angel Keristina³

Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya^{1,2,3}

¹*michellepattiasina1013@gmail.com*

Abstract: *This study aims to analyze the role of women in public spaces as agents of interfaith dialogue in Palangka Raya through a sociocultural feminist perspective. The research employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation involving women entrepreneurs, artists, representatives of the Department of Industry and Trade (Disperindag), and the Regional National Crafts Council (Dekranasda) of Palangka Raya. The analysis draws upon Habermas's theory of the public sphere, Arendt's concept of the space of appearance, Honneth's theory of recognition, and sociocultural feminist perspectives emphasizing women's agency within social and cultural relations. The findings reveal that public spaces in Palangka Raya function as arenas of social recognition, empowerment, and identity formation for women. Through participation in economic, cultural, artistic, and interfaith social activities, women develop interfaith dialogue through three models: parliament of religions dialogue, activism-based dialogue, and storytelling dialogue. The study further finds that Dayak local wisdom values, including handep (mutual cooperation), hapakat (consensus), and huma betang (communal living), strengthen inclusive and participatory interfaith relations. Despite encountering patriarchal constraints, women exercise transformative agency through social negotiation, collaboration, and cross-faith solidarity, contributing significantly to social cohesion within a multicultural and multireligious society.*

Keywords: *agency, interreligious dialogue, public space, sociocultural feminism, women.*

Abstrak: Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis peran perempuan dalam ruang publik melalui praktik dialog antaragama di Kota Palangka Raya dengan menggunakan pendekatan perspektif feminis sosiokultural. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologi agama. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pelaku UMKM khususnya kaum perempuan, seniman, perwakilan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya, dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Palangka Raya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ruang publik di Palangka Raya berfungsi sebagai arena eksistensi, pengakuan sosial, dan pemberdayaan perempuan. Dalam hal ini, melalui keterlibatan pada kegiatan ekonomi, seni, budaya, dan sosial lintas agama, kaum perempuan membangun praktik dialog antaragama dalam bentuk dialog berbasis aktivisme dan dialog yang berlangsung melalui *storytelling*. Penelitian ini juga menemukan bahwa nilai-nilai kearifan lokal seperti *Handep*, *Hapakat*, dan *Huma Betang* menjadi landasan dalam proses dialog antaragama yang inklusif dan partisipatif. Meskipun menghadapi hambatan patriarkal, perempuan mampu mengembangkan agensi transformasi melalui proses negosiasi sosial, kolaborasi, dan solidaritas lintas iman yang memperkuat kohesi sosial dalam masyarakat multireligius.

Kata Kunci: agensi, dialog antaragama, feminis sosiokultural, perempuan, ruang publik.

1. Pendahuluan

Perempuan sejak lama dihadapkan pada realitas sosial yang menempatkan mereka dalam dua ranah berbeda, yaitu ruang domestik dan ruang publik. Tradisi patriarkal mengonstruksi pandangan bahwa perempuan secara kodrati berperan sebagai pengelola rumah tangga dan pengasuh keluarga, sementara ruang publik menjadi domain laki-laki untuk berkiprah secara sosial, politik, dan ekonomi.¹ Pola pikir ini melahirkan bentuk subordinasi kultural yang membatasi ruang gerak perempuan, baik secara simbolik maupun praktis. Bahkan ketika perempuan tampil di ruang publik, kehadirannya sering dimaknai sebagai perpanjangan tangan dari tanggung jawab domestik semata.² Konstruksi sosial semacam ini memperkuat stereotip bahwa perempuan lemah, emosional, dan kurang rasional, sehingga mereka tidak dianggap memiliki kapasitas sebagai aktor sosial yang otonom.

Merujuk pada pandangan Hardiman, ruang publik merupakan arena terbuka yang dapat diakses oleh siapa pun tanpa pembedaan gender, tempat individu dan kelompok berinteraksi serta membangun tindakan sosial yang saling merespons.³ Permanasuri menambahkan bahwa ruang publik idealnya bersifat responsif, demokratis, bermakna, dan mudah diakses oleh seluruh anggota masyarakat. Dalam konteks tersebut, ruang publik tidak hanya menjadi tempat beraktivitas, tetapi juga wadah pembelajaran sosial yang memungkinkan terbentuknya kesadaran kolektif dan transformasi sosial. Dengan demikian, perempuan memiliki peluang yang sama untuk mengekspresikan diri, berpartisipasi aktif, dan memberi kontribusi nyata bagi kehidupan bersama.

Fenomena di Kota Palangka Raya menunjukkan bahwa perempuan tidak lagi terbatas pada peran domestik, melainkan aktif dalam berbagai sektor publik. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024, perempuan di Palangka Raya menyumbang 48,82% dari total tenaga profesional yang bekerja di ruang publik.⁴ Angka ini menegaskan bahwa perempuan memiliki peran strategis dalam pengembangan ekonomi, sosial, dan budaya di wilayah tersebut. Selain itu, mereka juga berkontribusi dalam berbagai bidang seperti usaha mikro kecil menengah (UMKM), kesenian, kegiatan sosial budaya, hingga keterlibatan dalam politik

¹ Mansour Fakhri, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), 35.

² Luh Riniti Rahayu and Putu Surya Wedra Lesmana, "Potensi Peran Perempuan Dalam Mewujudkan Moderasi Beragama Di Indonesia," *Jurnal Pustaka* 20, no. 1 (2020): 31.

³ F. Budi Hardiman, *Ruang Publik: Melacak Partisipasi Demokratis Dari Polis Sampai Cyberspace* (Yogyakarta: Kanisius, 2020), 10-12.

⁴ Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, "Persentase Perempuan sebagai Tenaga Profesional Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah," <https://kalteng.bps.go.id/id/statistics-table/2/ODk4IzI=/persentase-perempuan-sebagai-tenaga-profesional-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-kalimantan-tengah.html> (diakses pada 12 Juli 2025).

lokal, dengan tingkat partisipasi perempuan dalam ruang demokrasi mencapai 16,67%.⁵ Fakta ini memperlihatkan bahwa perempuan telah menjadi bagian penting dalam dinamika sosial yang membentuk wajah masyarakat Palangka Raya yang inklusif dan partisipatif.

Lebih dari sekadar partisipasi ekonomi atau politik, keterlibatan perempuan di ruang publik juga memiliki implikasi yang signifikan dalam membangun praktik dialog antaragama. Perempuan dengan latar belakang budaya, profesi, dan komunitas yang beragam dapat berpotensi untuk menjadi agen perdamaian yang menginisiasi ruang-ruang pertemuan lintas iman. Dalam hal ini, melalui aktivitas sosial dan kultural, perempuan menciptakan bentuk komunikasi yang menekankan empati, keterhubungan emosional, dan nilai-nilai kemanusiaan universal.⁶ Potensi ini selaras dengan gagasan Kwok Pui-Lan yang menyoroti keterbatasan perempuan dalam proses dialog antaragama formal, padahal pengalaman dan perspektif mereka dapat memperkaya dinamika dialog lintas iman dengan pendekatan yang lebih humanis dan transformatif.⁷

Dalam penelusuran yang dilakukan, ditemukan bahwa ada beberapa kajian terdahulu tentang perempuan, ruang publik dan dialog antaragama, seperti oleh Casaveccia, Carbone, dan Canta (2023);⁸ Rohmawati (2020);⁹ Rohmawati, Hamidah, dan Gayatri (2021);¹⁰ Rahayu dan Lesmana (2020);¹¹ Lapalu dan Elizabeth (2021);¹² serta Nelwan (2023)¹³ menunjukkan bahwa perempuan memiliki kontribusi penting dalam membangun komunikasi lintas agama dan memperkuat moderasi beragama. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada ranah formal, seperti lembaga parlemen, organisasi lintas iman, atau pemberdayaan ekonomi. Belum banyak kajian yang menyoroti praktik mikro keterlibatan perempuan dalam ruang publik sosial-kultural sebagai medium dialog antaragama, terlebih dengan menggunakan

⁵ Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, "Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024," <https://kalteng.bps.go.id/id/statistics-table/2/ODk3IzI=/persentase-keterlibatan-perempuan-di-parlemen-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-kalimantan-tengah.html> (diakses 12 Juli 2025).

⁶ Julia Cleves Mosse, *Gender dan Pembangunan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 9.

⁷ Kwok Pui Lan, *Globalization, Gender and Peacebuilding: The Future of Interfaith Dialogue* (New York: Paulist Press, 2011), 31.

⁸ Martha Sims and Martine Stephens, *Living Folklore: An Introduction to the Study of People and Their Traditions* (Logan: Utah State University Press, 2011).

⁹ W. S. Rohmawati, "The Role of Women in Interreligious Dialogue in Indonesia: A Study on the Forum for Religious Harmony (FKUB)," *Muslim World Journal* 110, no. 4 (2020).

¹⁰ W. S. A. Rohmawati, K. Hamidah, and E. Gayatri, "Integrating Interfaith Dialogue and Economic Empowerment: A Study on Interfaith Women Community Srilili Yogyakarta," *Religio Jurnal Studi Agama-Agama* 11, no. 2 (2021): 139-164.

¹¹ Luh Riniti Rahayu and Putu Surya Wedra Lesmana, "Potensi Peran Perempuan Dalam Mewujudkan Moderasi Beragama Di Indonesia," *Jurnal Pustaka* 20, no. 1 (2020): 31-37.

¹² Ester Sonya Ulfartha Lapalu and Elizabeth, "Eksistensi Perempuan Di Parlemen: Studi Kesetaraan Gender Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangkaraya," *Wacana: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Interdisiplin* 8, no. 2 (2021): 306-320.

¹³ Gerry Nelwan, "Perempuan Dalam Gerakan Lintas Iman: Agen Perdamaian Di Kota Manado," *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat* 7, no. 1 (2023): 1-12.

perspektif feminis sosiokultural yang berfokus pada pengalaman hidup, relasi kuasa, dan konstruksi sosial terhadap peran perempuan.

Berdasarkan telaah tersebut, penelitian ini berargumen bahwa perempuan di Kota Palangka Raya tidak hanya berpartisipasi dalam ruang publik sebagai pelengkap aktivitas sosial dan kultural, tetapi juga berperan sebagai agen dialog antaragama yang secara aktif membangun relasi lintas iman melalui praktik-praktik keseharian yang berbasis empati, kepedulian sosial, dan kerja kolaboratif. Melalui perspektif feminis sosiokultural, penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam ruang publik sosial-kultural merupakan bentuk agensi yang mampu menantang konstruksi patriarkal yang membatasi peran perempuan sekaligus menghadirkan model dialog antaragama yang lebih inklusif, egaliter, dan transformatif. Dengan demikian, eksistensi perempuan di ruang publik tidak hanya berkontribusi pada penguatan kohesi sosial dan kehidupan keberagaman di Palangka Raya, tetapi juga memperluas pemahaman tentang dialog antaragama yang selama ini cenderung dipahami dalam kerangka formal dan institusional.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk memahami secara mendalam fenomena keterlibatan perempuan di ruang publik dalam praktik dialog antaragama di Kota Palangka Raya. Pendekatan kualitatif dipilih dengan tujuan untuk menelusuri makna, pengalaman, dan perspektif perempuan dalam konteks sosial-budaya dan keagamaan.¹⁴ Penelitian ini ditempatkan dalam bingkai sosiologi agama dengan perspektif feminis sosiokultural, yang menempatkan gender sebagai hasil konstruksi sosial dan kultural yang dinegosiasikan dalam interaksi sosial, sekaligus mengkritisi batasan patriarkal yang membatasi partisipasi perempuan dalam ranah dialog lintas agama.

Kegiatan penelitian berlangsung di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, yang memiliki keragaman agama dan dinamika sosial yang kuat. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi yang berlangsung pada tahun 2025. Observasi dilakukan terhadap aktivitas perempuan di ruang publik, terutama di pusat-pusat ekonomi dan komunitas sosial yang dipelopori perempuan. Wawancara dilakukan dengan perempuan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pelatih tari, perwakilan dari Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian (Disperindag), serta perwakilan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Palangka Raya. Teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui berbagai dokumen, laporan, dan publikasi media terkait kegiatan dialog antaragama yang diinisiasi perempuan.

¹⁴ John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 28.

3. Hasil dan Pembahasan

Ruang Publik sebagai Arena Eksistensi dan Pengakuan Sosial Perempuan

Ruang publik memiliki fungsi penting sebagai arena sosial bagi individu untuk menampilkan diri, berinteraksi, dan memperoleh pengakuan dari masyarakat. Dalam konteks sosiologis, ruang publik bukan sekadar tempat fisik, melainkan juga arena simbolik yang memungkinkan terjadinya pertukaran gagasan, komunikasi sosial, dan pembentukan identitas kolektif.¹⁵ Berdasarkan pemikiran Habermas, ruang publik adalah *public sphere* yang merujuk pada sebuah ranah diskursif di mana masyarakat dapat mengartikulasikan kepentingan, pandangan, dan pengalaman secara rasional dan setara tanpa dominasi kekuasaan.¹⁶ Dalam kerangka ini, ruang publik menjadi wadah bagi praktik komunikasi yang bebas, terbuka, dan partisipatif. Bagi perempuan, keterlibatan dalam ruang publik bukan hanya tentang partisipasi sosial, tetapi juga tentang perjuangan untuk memperoleh pengakuan atas eksistensi, kapasitas, dan identitas mereka sebagai subjek sosial yang setara dalam struktur masyarakat.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan melalui observasi terhadap wilayah kota Palangka Raya, ditemukan bahwa ruang publik lokal tidak hanya terbatas pada kawasan formal seperti taman kota atau pusat kebudayaan, tetapi juga meluas hingga arena pasar, kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pelatihan keterampilan, festival budaya, dan kegiatan keagamaan lintas iman. Melalui arena-arena ini, perempuan dari berbagai latar belakang agama dan etnis berpartisipasi secara aktif dalam aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya. Bahkan hal ini juga ditegaskan oleh salah seorang pelaku UMKM bahwa ruang publik memberikan kesempatan bagi perempuan untuk diakui dan diberdayakan dengan cara memberikan kontribusi secara langsung bagi masyarakat di tengah keberagaman agama.¹⁷ Sejalan dengan pelaku UMKM, seorang perempuan seniman yang menganut agama Kristen juga menyatakan bahwa keterlibatannya dalam berbagai kegiatan di luar rumah memberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain, berbagi ide dan keterampilan, serta membangun hubungan yang saling membantu. Pengalaman ini membuat perempuan tersebut merasa lebih diterima, dihargai, dan memperoleh pengakuan yang tidak hanya terbatas pada perannya dalam keluarga.¹⁸ Keberadaan perempuan dalam ruang-ruang ini mencerminkan pembentukan *public sphere* yang bersifat inklusif dan komunikatif, sehingga perbedaan agama dan budaya tidak menjadi penghalang untuk membangun kerja sama sosial.

¹⁵ Ghoustanjiwani Putra, Daim Triwahyono, and Hani Zulfia Zahro, "Kajian Ruang Publik Sebagai Modal Sosial Pembentuk Kohesi Sosial Sebagai Respon Era Industri 4.0," *Prosiding SEMSINA*, 2019, 128.

¹⁶ Yadi Supriadi, "Relasi Ruang Publik dan Pers Menurut Habermas," *Jurnal Kajian Jurnalis* 1, no. 1 (2017): 5-6.

¹⁷ Pelaku UMKM, wawancara oleh penulis, Palangka Raya, Indonesia, 10 September 2025.

¹⁸ Pelatih Tari, wawancara oleh penulis, Palangka Raya, Indonesia, 10 September 2025.

Dalam aktivitas ekonomi seperti UMKM, perempuan berperan sebagai pelaku utama pada bagian produksi dan pemasaran produk lokal. Perempuan dengan beragam latar belakang agama, sosial, dan budaya saling berkolaborasi dalam kelompok usaha tersebut sehingga memperlihatkan adanya bentuk komunikasi non-dominatif yang digambarkan Habermas sebagai ideal komunikasi rasional.¹⁹ Perempuan saling berbagi pengalaman, strategi usaha, dan pengetahuan teknologi tanpa memandang perbedaan keyakinan. Salah seorang informan menjelaskan bahwa dalam kegiatan usaha bersama, perbedaan agama tidak pernah menjadi hambatan untuk bekerja sama. Menurutnya, setiap anggota kelompok saling membantu dalam proses produksi, berbagi informasi pemasaran, serta bertukar pengalaman untuk mengembangkan usaha yang dijalankan. Bahkan, hubungan yang terbangun melalui kegiatan ekonomi tersebut menciptakan rasa saling percaya dan solidaritas di antara anggota kelompok.²⁰ Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya menjadi sarana peningkatan kesejahteraan, tetapi juga menjadi ruang pertemuan yang memungkinkan terbentuknya relasi sosial yang inklusif dan dialogis antarperempuan lintas agama. Bahkan pola interaksi ini sekaligus menjadi cerminan praktik dialog antaragama yang berakar pada kehidupan sehari-hari (*everyday interfaith dialogue*), bukan hanya pada tataran wacana, tetapi juga tindakan nyata. Dengan demikian, ruang publik di Palangka Raya berfungsi ganda, yakni sebagai arena ekonomi produktif dan sebagai ruang sosial yang memperkuat nilai kesetaraan, solidaritas, dan pengakuan.

Sejalan dengan hal tersebut, pemikiran Hannah Arendt tentang *space of appearance* memberikan kerangka penting untuk memahami dinamika eksistensi perempuan di ruang publik. Menurut Arendt, seseorang “muncul” ke dunia publik ketika bertindak dan berbicara di hadapan orang lain sebagai tindakan yang menandai keberadaan secara sosial-politik.²¹ Dalam konteks Palangka Raya, perempuan menemukan *space of appearance* mereka melalui berbagai aktivitas publik seperti festival budaya, pelatihan tari tradisional, kegiatan sosial lintas iman, dan usaha kreatif. Aktivitas-aktivitas ini memberi perempuan ruang untuk menunjukkan kemampuan, kreativitas, dan kontribusi nyata di hadapan masyarakat luas. Kaum perempuan di Palangka Raya menggambarkan pergeseran kesadaran dan eksistensi diri dari ranah domestik menuju partisipasi publik. Keterlibatan perempuan dalam aktivitas sosial dan ekonomi memungkinkan munculnya pengakuan sosial (*social recognition*). Hal ini sejalan dengan pemikiran Axel Honneth yang menegaskan bahwa pengakuan menjadi syarat bagi terbentuknya harga diri dan identitas sosial seseorang.²² Oleh sebab itu, ruang publik di Palangka Raya bukan hanya tempat perempuan “bekerja”, melainkan

¹⁹ Supriadi, “Relasi Ruang Publik dan Pers Menurut Habermas,” 6.

²⁰ Pelaku UMKM, wawancara oleh penulis, Palangka Raya, Indonesia, 10 September 2025.

²¹ F. Budi Hardiman, *Komersialisasi Ruang Publik Menurut Hannah Arendt dan Jurgen Habermas* (Yogyakarta: Kanisius, 2010), 187.

²² Adam Chmielewski, “Perception, Recognition, and the Aesthetics of Exclusion,” *Philosophia Journal* 53, no. 3 (2025): 629.

juga tempat mereka “diakui” sebagai individu yang memiliki kapasitas, ide, dan nilai sosial. Sejalan dengan hal tersebut, pemikiran Hannah Arendt tentang *space of appearance* memberikan kerangka penting untuk memahami dinamika eksistensi perempuan di ruang publik. Menurut Arendt, seseorang “muncul” ke dunia publik ketika bertindak dan berbicara di hadapan orang lain sebagai tindakan yang menandai keberadaan secara sosial-politik.²³ Temuan ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Palangka Raya yang menyatakan bahwa berbagai kegiatan pameran kerajinan, pelatihan kewirausahaan, dan promosi produk lokal tidak hanya bertujuan meningkatkan pendapatan perempuan, tetapi juga memberikan ruang bagi mereka untuk tampil, membangun jejaring, serta memperoleh pengakuan atas karya dan kemampuan yang dimiliki.²⁴ Menurutnya, banyak perempuan yang awalnya hanya berperan dalam lingkup rumah tangga kemudian berkembang menjadi pelaku usaha dan penggerak komunitas setelah memperoleh kesempatan untuk terlibat dalam program-program Dekranasda.²⁵ Kondisi ini menunjukkan bahwa ruang publik berfungsi sebagai arena yang memungkinkan perempuan memperlihatkan kapasitasnya sekaligus memperoleh legitimasi sosial dari masyarakat.

Dalam perspektif feminis sosiokultural, ruang publik juga berfungsi sebagai arena negosiasi identitas dan resistensi terhadap struktur patriarki yang menempatkan perempuan di posisi subordinat. Melalui aktivitas publik seperti UMKM dan festival budaya, perempuan tidak hanya mengisi ruang yang telah ada, tetapi turut merekonstruksi makna ruang publik tersebut dari yang bersifat maskulin dan eksklusif, menjadi ruang yang ramah, partisipatif, dan berkeadilan gender. Dalam proses ini, ruang publik menjadi alat transformasi sosial yang memperluas peran perempuan sebagai agen perubahan. Dengan demikian, keterlibatan perempuan dalam ruang publik bukan hanya mencerminkan partisipasi sosial, tetapi juga menandai bentuk perjuangan simbolik untuk memperoleh pengakuan, otonomi, dan legitimasi identitas dalam tatanan sosial yang lebih setara

Selaras dengan pandangan Permanasuri, ruang publik yang ideal memiliki empat kriteria penting, yakni responsif, demokratis, *meaningful*, dan aksesibel.²⁶ Empat ruang tersebut dapat ditemukan dalam praktik sosial perempuan di Palangka Raya. Pertama, responsivitas ruang publik tercermin dalam kemampuan ruang sosial menjawab kebutuhan aktual perempuan, seperti peningkatan kapasitas ekonomi, pengembangan keterampilan, serta penciptaan rasa aman dan nyaman. Ruang publik di Kota Palangka

²³ F. Budi Hardiman, *Komersialisasi Ruang Publik Menurut Hannah Arendt Dan Jurgen Habermas* (Yogyakarta: Kanisius, 2010), 187.

²⁴ Pengurus Dekranasda, wawancara oleh penulis, Palangka Raya, Indonesia, 15 September 2025.

²⁵ Perwakilan Dekranasda, wawancara oleh penulis, Palangka Raya, Indonesia, 15 September 2025.

²⁶ Ni Putu Diah Agustin Permanasuri, “Persepsi Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Ruang Terbuka Publik Sebagai Kegiatan Olahraga,” *Jurnal Ilmiah Sangkareang Mataram* 9, no. 2 (2022): 13-14.

Raya terbentuk sebagai respons terhadap kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat yang sebagian besar digerakkan oleh perempuan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Palangka Raya, dinyatakan bahwa mereka turut memberikan dukungan bagi kaum perempuan berupa pelatihan keterampilan, pemasaran digital, dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).²⁷ Aktivitas ini menjadi wujud nyata partisipasi perempuan di ruang publik dalam menjalankan fungsi yang adaptif dan responsif terhadap upaya peningkatan kapasitas serta kesejahteraan bersama. Oleh sebab itu, dukungan yang diberikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Palangka Raya turut memperluas fungsi ruang publik, tidak hanya sebagai wadah fisik, tetapi juga sebagai media pemberdayaan dan penguatan kompetensi perempuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa ruang publik di Palangka Raya berkembang menjadi ruang yang dinamis dan inklusif, menyesuaikan diri dengan kebutuhan para penggunanya, khususnya perempuan. Dengan demikian, keberadaan ruang pelatihan, UMKM, dan berbagai kegiatan kreatif memperlihatkan bahwa ruang publik telah bertransformasi menjadi *living space* yang memberikan peluang nyata bagi perempuan untuk mencapai kemandirian, memperoleh pengakuan sosial, serta meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Kedua, dari segi demokratis, ruang publik di Palangka Raya membuka akses yang sama bagi perempuan dari berbagai latar belakang agama dan sosial. Fakta bahwa 90% pelaku UMKM di kota ini adalah perempuan lintas iman menunjukkan bahwa ruang publik telah menjadi wadah bagi praktik kesetaraan sosial dan religius.²⁸ Pola kerja sama yang terbangun di antara mereka menunjukan *grassroots democracy* yang lahir dari praktik keseharian dan nilai-nilai kebersamaan. Perempuan membangun relasi kerja sama yang didasarkan pada rasa percaya, etos kerja, dan semangat gotong royong. Dengan demikian, ruang publik di Palangka Raya berfungsi sebagai ruang demokratis yang menghapus batas sosial dan gender, serta memperkuat nilai-nilai kebebasan, solidaritas, dan kesetaraan.

Ketiga, ruang publik tersebut memiliki makna *meaningful*. Artinya bahwa ruang publik tidak hanya berorientasi ekonomi, tetapi juga memperkuat hubungan sosial, solidaritas, dan kesadaran multikultural. Ruang publik di Palangka Raya menunjukkan karakter *meaningful* melalui kegiatan yang mempertemukan unsur ekonomi, budaya, dan sosial secara harmonis. Hal ini dapat ditemukan melalui kegiatan Festival Budaya Isen Mulang, pelatihan tari tradisional yang terjadi secara lintas agama, dan pelatihan keterampilan. Bahkan juga ditegaskan melalui kegiatan Huma Betang Night yang

²⁷ Perwakilan Disperindag Kota Palangka Raya, wawancara oleh penulis, Palangka Raya, Indonesia, 13 September 2025.

²⁸ Perwakilan Disperindag Kota Palangka, wawancara oleh penulis, Palangka Raya, Indonesia, 13 September 2025. (Data tersebut merupakan hasil rekapan Disperindag Kota Palangka Raya terhadap laporan-laporan kegiatan yang disampaikan oleh para pelaku UMKM).

menjadi ruang bagi para pelaku UMKM dan seni untuk dapat mengekspresikan diri bagi masyarakat.²⁹ Melalui kegiatan seperti ini, perempuan belajar memahami keragaman, memperkuat identitas lokal, serta menginternalisasi nilai toleransi dan empati.

Keempat, aspek aksesibilitas. Ruang publik di Palangka Raya memberikan akses terbuka bagi semua lapisan masyarakat. Setiap perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi tanpa hambatan berbasis agama, status sosial, atau ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa aksesibilitas ruang publik terjaga, dan tidak ada dominasi kelompok tertentu dalam memanfaatkan keterlibatan pada ruang tersebut. Bahkan, ruang publik seperti ini memberikan akses simbolik melalui pengakuan sosial atas kehadiran dan kontribusi perempuan dalam kehidupan di tengah masyarakat.

Berdasarkan keempat ruang di atas, maka dapat ditemukan bahwa ruang publik di Palangka Raya bukan sekadar tempat berkumpul, tetapi merupakan arena pembentukan eksistensi sosial perempuan sehingga dapat memperoleh pengakuan, memperluas agensi, dan membangun solidaritas lintas iman. Melalui proses interaksi yang dinamis, perempuan telah mengubah ruang publik menjadi *“living space of empowerment”*, serta ruang hidup yang komunikatif dan transformatif.

Ruang publik juga berfungsi sebagai *social learning space*, tempat perempuan mengembangkan kesadaran baru tentang diri dan masyarakat. Dalam interaksi lintas agama dan budaya yang berlangsung di pasar, pelatihan, maupun acara komunitas, perempuan belajar menumbuhkan nilai-nilai seperti empati, gotong royong, dan kesetaraan. Proses ini bukan hanya memperkuat kohesi sosial, tetapi juga membangun fondasi bagi dialog antaragama yang berperspektif feminis sosiokultural, yakni dialog yang berangkat dari pengalaman konkret, relasi setara, dan solidaritas kemanusiaan. Oleh sebab itu, ruang publik di Palangka Raya dapat dipahami sebagai arena eksistensi sekaligus transformasi sosial perempuan. Ruang ini menjadi tempat bagi perempuan untuk menegosiasikan posisi sosialnya, menantang batas patriarki, serta memperjuangkan pengakuan dan kesetaraan dalam masyarakat plural. Dengan demikian, dalam konteks seperti ini, keterlibatan perempuan bukan hanya kontribusi terhadap pembangunan ekonomi, melainkan juga bagian dari upaya membangun budaya damai, toleransi, dan penghargaan terhadap keberagaman yang menjadi ciri khas kota Palangka Raya.

Agensi Perempuan dan Pembentukan Dialog Antaragama Berbasis Feminis Sosiokultural di Palangka Raya

Keberagaman agama di Kota Palangka Raya yang mencakup Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu telah membentuk lanskap sosial yang

²⁹ Berita Huma Betang Night Kembali digelar keenam kalinya, “Gubernur Kalteng tegaskan Lestarkan Budaya dan Dorong UMKM,” <https://kalteng.go.id/berita/read/42103/huma-batang-night-kembali-digelar-untuk-keenam-kalinya-gubernur-kalteng-tegaskan-komitmen-lestarikan-budaya-dan-dorong-umkm> (diakses 10 Oktober 2025).

multireligius dan inklusif. Realitas ini dapat ditunjukkan melalui data kependudukan tahun 2020–2023 berikut ini:

Tabel 1. Data Jumlah Penduduk Kota Palangka Raya tahun 2020-2023³⁰

NO	AGAMA	JUMLAH BERDASARKAN TAHUN (Jiwa)			
		2020	2021	2022	2023
1.	Islam	119.140	201.636	209.202	246.427
2.	Kristen Protestan	73.641	74.270	76.279	218.079
3.	Katolik	5.511	5.603	5.901	18.509
4.	Hindu	3.453	3.465	3.589	10.902
5.	Buddha	485	493	486	1.476
6.	Konghucu	8	8	10	30
	TOTAL	202.238	285.474	295.467	495.423

Sejalan dengan hal tersebut, Badan Pusat Statistik juga merilis data berdasarkan agama dan jenis kelamin sebagai berikut:

Tabel 2. Data Jumlah Penduduk Palangka Raya Menurut Agama dan Jenis Kelamin tahun 2021³¹

NO	AGAMA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	Islam	103.071	98.565	201.636
2.	Kristen Protestan	36.920	37.350	74.270
3.	Katolik	2.925	2.678	5.603
4.	Hindu	1.767	1.698	3.465
5.	Budha	263	230	493
6.	Konghucu	4	4	8

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, Badan Pusat Statistik belum mempublikasikan data terbaru tentang jumlah penduduk Palangka Raya menurut agama dan jenis kelamin tahun 2022-2025. Badan Pusat Statistik (BPS) mempublikasikan data jumlah penduduk secara umum untuk periode tahun 2020–2023 sebagaimana disajikan pada Tabel 1. Namun, data yang lebih spesifik mengenai jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin hanya tersedia dan dipublikasikan untuk tahun 2021. Merujuk pada data di atas, maka terdapat komposisi penduduk yang relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan menegaskan peluang partisipasi sosial yang

³⁰ Data tahun 2020-2022 diperoleh melalui Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, <https://palangkakota.bps.go.id/indicator/12/418/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-agama-yang-dianut-di-kota-palangka-raya.html>, dan data tahun 2023 diperoleh melalui <https://pasada.palangkaraya.go.id/user/tabeluser/detail/861> (diakses 13 Oktober 2025).

³¹ Palangka Raya Satu Data, <https://pasada.palangkaraya.go.id/user/tabeluser/detail/301> (diakses 15 Oktober 2025).

setara dalam berbagai ruang publik. Keseimbangan ini tidak hanya bersifat demografis, tetapi juga menciptakan kondisi sosial yang memungkinkan perempuan berperan aktif dalam proses interaksi lintas agama. Dengan demikian, perempuan di Palangka Raya memiliki posisi strategis dalam membangun komunikasi antaragama melalui aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya di ruang publik.

Dalam konteks feminis sosiokultural, agensi perempuan dimaknai sebagai kemampuan bertindak, bernegosiasi, dan merekonstruksi struktur sosial yang mengekang melalui pengalaman hidup sehari-hari.³² Mahmood menunjukkan bahwa agensi perempuan dapat muncul melalui praktik ketaatan, negosiasi, dan penyesuaian dalam struktur sosial dan religius. Dengan kata lain, perempuan memiliki kapasitas untuk bertindak secara reflektif dan strategis dalam konteks sosial yang membatasi mereka. Pandangan ini sejalan dengan pendekatan feminis sosiokultural, yang menekankan bahwa agensi terbentuk dari pengalaman hidup melalui relasi sosial, dan bukan hanya dari kesadaran politik.

Pendekatan feminis sosiokultural menempatkan pengalaman perempuan sebagai sumber pengetahuan sosial. Dalam hal ini, pengalaman perempuan di ruang publik Palangka Raya mencerminkan bentuk *reclaiming agency*, yakni proses merebut kembali otoritas sosial yang sebelumnya dimarginalkan oleh struktur patriarki agama dan budaya. Keterlibatan perempuan dalam ruang publik menjadi bentuk pergeseran dari *invisibility* menuju *visibility*. Dalam kerangka inilah, keberadaan kaum perempuan dalam ruang dialog antaragama diakui. Praktik dialog yang dilakukan lebih merujuk pada praksis sosial yang mengutamakan nilai keterbukaan dan menjadi proses transformatif. Dengan demikian, perempuan dapat menegosiasikan identitas diri dalam agensi sebagai subjek di ruang domestik dan juga sebagai subjek di ruang publik yang mampu menyatakan nilai-nilai kemanusiaan sebagai bagian dari perdamaian.

Merujuk pada hal di atas, agensi perempuan dalam praktik dialog antar agama dapat ditemukan melalui model-model yang dikemukakan oleh Fletcher, yakni dialog parlemen agama, dialog berbasis aktivisme, dan dialog *storytelling*.³³ Model pertama, dialog parlemen agama-agama. Dialog model ini berlangsung secara formal dan institusional. Dalam konteks Palangka Raya, perempuan terlibat pada kegiatan bernuansa seni budaya yang diselenggarakan oleh pemerintah dan lembaga keagamaan. Kegiatan ini tidak berbasis satu agama, sehingga proses perjumpaan menjadi ruang inklusif yang melibatkan komunitas perempuan dengan berbagai latar belakang yang berbeda. Model kedua ialah dialog berbasis aktivisme yang menekankan pada aksi kemanusiaan. Pada model ini, kehadiran kaum perempuan dalam ruang sosial dan keagamaan seperti pasar, pelatihan UMKM, seni, dan pameran budaya. Dalam hal ini,

³² S. Mahmood, *Politics of Piety: The Islamic Revival and the Feminist Subject* (Princeton: NJ: Princeton University Press, 2005), 13.

³³ Jeannine Hill Fletcher, *Women in Inter-Religious Dialogue*, in *The Wiley-Blackwell Companion to Inter-Religious Dialogue* (Chichester: Wiley-Blackwell, 2013), 170-176.

aktivitas yang dilakukan menekankan pada aspek kemanusiaan yang tidak dibatasi oleh latar belakang agama. Perempuan boleh memainkan peranan dalam mewujudkan solidaritas dalam komunitas lintas agama dalam kerangka ini. Model yang ketiga ialah dialog *storytelling* sebagai ruang sharing terkait pengalaman spiritual sekaligus medium untuk mentransfer nilai kemanusiaan. Dalam kerangka feminis sosiokultural, proses ini menjadi bentuk grassroots dialogue yang menghubungkan setiap perempuan untuk saling memberdayakan. Oleh sebab itu, model yang ditawarkan oleh Fletcher mengakomodir perempuan dari akar rumput dalam praktik *voice empowerment* yang menghidupkan nilai-nilai kesetaraan, perdamaian, dan solidaritas dalam ruang lintas agama.

Berdasarkan hal di atas, maka dalam kerangka feminis sosiokultural, aktivitas yang dikerjakan oleh kaum perempuan di Palangka Raya telah menggambarkan bentuk negosiasi diri dalam ruang sosial budaya yang mengutamakan empati dan solidaritas sebagai dasar dalam relasi sosial. Apabila ditinjau lebih dalam, maka ditemukan bahwa perempuan bukan hanya menjadikan nilai-nilai tersebut sebagai dasar, melainkan juga dipengaruhi oleh kearifan lokal yang selama ini telah dihidupi bersama. Kearifan lokal tersebut ialah pertama, nilai *handep* yang menekankan pada kerja sama sebagai perempuan Dayak yang lahir dalam keberagaman agama. Kedua, nilai *hapakat* yang menekankan pada proses musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Perempuan diberikan kesempatan untuk menyuarakan pandangan dan pengalaman pada ruang yang terbuka. Dalam hal ini, nilai *hapakat* menciptakan budaya berdialog yang saling menerima dan menghargai sehingga tercipta keharmonisan dalam ruang keberagaman. Ketiga, nilai *huma betang* yang menekankan pada aspek kebersamaan, solidaritas, dan kesetaraan. Nilai ini lahir dari filosofi keberagaman yang selama ini dihidupi secara kolektif oleh perempuan sebagai orang Dayak.³⁴ Kaum perempuan dalam konteks ini berfungsi sebagai aktor yang menerapkan nilai-nilai kehidupan, bermula dalam ranah keluarga sebagai ruang domestik dan berkembang ke masyarakat umum dalam ruang publik. Oleh sebab itu, dalam perspektif sosiokultural feminis, ketiga nilai ini bukan hanya menjadi warisan budaya tetapi juga sebagai alat yang digunakan oleh kaum perempuan untuk membicarakan peranan mereka sendiri. Bahkan hal ini sejalan dengan Batliwala yang mengemukakan tentang *transformative agency* dalam proses melawan relasi kuasa melalui tindakan kolaborasi dan partisipasi sosial.³⁵ Dalam kerangka inilah, perempuan di Palangka Raya telah memberikan penegasan bahwa dialog antaragama dipraktikkan bukan dari hasil kebijakan formal, melainkan lahir dari praksis sosial yang tumbuh dari pengalaman bersama.

³⁴ Sharon Michelle O. Pattiasina, "Huma Betang's Philosophy: Interreligious Harmony and Weaving of National Identity in Palangka Raya," *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 21, no. 1 (2025): 24.

³⁵ Srilatha Batliwala, "Taking the Power out of Empowerment – an Experiential Account," *Development in Practice* 17, no. 4 (2010): 559.

Tantangan dan Strategi Agensi Perempuan di Ruang Publik

Salah satu tantangan utama dalam keterlibatan mereka di ruang publik ialah budaya patriarki. Dalam kerangka ini, meskipun perempuan aktif melakukan aksi sosial di tengah masyarakat, namun budaya tersebut tetap mengkonstruksikan perempuan sebagai penanggungjawab utama dalam ruang domestik. Tanggung jawab ini mencakup urusan rumah tangga, pengasuh anak, dan pelayan keluarga. Realitas seperti ini memberikan penegasan bahwa keterlibatan perempuan di publik belum menjadi ruang netral sebab masih dipengaruhi oleh struktur dan nilai patriarkal.

Selain itu, perempuan juga diperhadapkan dengan struktur kelembagaan yang sejauh ini masih didominasi oleh laki-laki. Ditemukan dalam berbagai forum keagamaan, posisi strategis yang berkaitan dengan pengambilan keputusan masih didominasi oleh laki-laki. Hal ini mengakibatkan perempuan lebih sering aktif di bidang sosial budaya dan aktivitas pendukung lainnya daripada terlibat sebagai perumus kebijakan. Dalam kerangka ini, nampak bahwa ada ketimpangan relasi kuasa yang masih membatasi ruang keterlibatan perempuan secara substantif.

Merujuk pada hal di atas, maka dalam kerangka menghadapi tantangan tersebut, perempuan melakukan perlawanan dengan cara yang berbeda. Mereka lebih memilih untuk mengembangkan strategi negosiasi melalui keterlibatan dalam kegiatan ekonomi, seni, budaya, dan aktivitas sosial lintas agama. Hal ini dapat ditemukan melalui aktivitas UMKM, pelatihan keterampilan, komunitas budaya, serta kegiatan ke masyarakat yang menjadi ruang bagi perempuan untuk membangun serta mengembangkan kapasitas diri, memperluas jaringan sosial, dan memperoleh pengakuan di publik. Strategi ini menegaskan bahwa secara tidak langsung, perempuan telah bertahap membangun legitimasi sosial yang memungkinkan suara dan pengalaman mereka semakin diperhitungkan dalam kehidupan masyarakat. Bahkan juga, tindakan yang dilakukan oleh mereka dapat menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan untuk menciptakan ruang yang inklusif bagi perempuan di Palangka Raya.

Dalam kerangka ini, pendekatan feminis sosiokultural menempatkan strategi yang dilakukan oleh perempuan di Palangka Raya sebagai bagian dari agensi transformatif. Agensi tersebut tidak hanya nampak pada keterampilan untuk berpartisipasi pada ruang publik, melainkan juga dari kemampuan untuk merekonstruksi makna ruang publik sebagai arena yang inklusif dan setara. Bahkan, dalam hal ini juga perempuan secara tidak langsung menciptakan ruang dialog antaragama yang berbasis pengalaman hidup, solidaritas sosial, dan kerja sama sehingga secara perlahan mereka menggeser batas-batas gender yang sebelumnya telah membatasi partisipasi mereka. Dengan demikian, ruang dialog yang tercipta bukan hanya untuk menjadi sarana membangun harmoni sosial, tetapi juga menjadi ruang negosiasi relasi kuasa yang memungkinkan perempuan memperjuangkan pengakuan, kesetaraan, dan keadilan sosial.

4. Kesimpulan

Ruang publik di Palangka Raya berfungsi sebagai arena sosial dan budaya yang memberi tempat bagi perempuan menegosiasikan identitas, memperoleh pengakuan, dan membangun dialog antaragama berdasarkan perspektif feminis sosiokultural. Keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi, seni, dan sosiokultural menunjukkan bentuk agensi transformatif yang secara bertahap dapat mengubah relasi kekuasaan patriarki melalui kolaborasi, empati, dan solidaritas antaragama. Melalui praktik dialog parlementer antaragama, dialog berbasis aktivisme, dan dialog *storytelling*, perempuan di Palangka Raya menghadirkan model dialog antaragama yang inklusif, egaliter, dan berdasarkan pengalaman hidup. Nilai-nilai lokal seperti *hapakat*, *handep*, dan *huma betang* memainkan peran penting dalam membentuk hibridisasi budaya antara etika feminis dan kearifan lokal Dayak. Proses ini berkontribusi pada pembentukan dialog yang menumbuhkan rasa saling percaya dan memperkuat kohesi sosial dalam masyarakat multireligius. Dengan demikian, ruang publik tidak hanya berfungsi sebagai forum untuk partisipasi perempuan tetapi juga menjadi ruang hidup pemberdayaan yang memungkinkan munculnya kesadaran baru tentang perdamaian, keadilan, dan kesetaraan.

Referensi

- Batliwala, Srilatha. "Taking the Power out of Empowerment – an Experiential Account," *Develompent in Practice* 17, no. 4 (2010): 557-565, DOI:[10.1080/09614520701469559](https://doi.org/10.1080/09614520701469559)
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, "Persentase Perempuan sebagai Tenaga Profesional Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah" <https://kalteng.bps.go.id/id/statistics-table/2/ODk4IzI=/persentase-perempuan-sebagai-tenaga-profesional-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-kalimantan-tengah.html> (diakses 12 Juli 2025).
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024, <https://kalteng.bps.go.id/id/statistics-table/2/ODk3IzI=/persentase-keterlibatan-perempuan-di-parlemen-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-kalimantan-tengah.html> (diakses 12 Juli 2025).
- Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, <https://palangkakota.bps.go.id/indicator/12/418/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-agama-yang-dianut-di-kota-palangka-raya.html> diakses 13 Oktober 2025).
- Berita Huma Betang Night Kembali digelar keenam kalinya, Gubernur Kalteng tegaskan Lestarikan Budaya dan Dorong UMKM,

<https://kalteng.go.id/berita/read/42103/huma-batang-night-kembali-digelar-untuk-keenam-kalinya-gubernur-kalteng-tegaskan-komitmen-lestarikan-budaya-dan-dorong-umkm> (diakses 10 Oktober 2025).

- Chmielewski, Adam. "Perception, Recognition, and the Aesthetics of Exclusion," *Philosophia Journal* 53, no. 3 (2025): 629-649, DOI:[10.1007/s11406-025-00836-7](https://doi.org/10.1007/s11406-025-00836-7)
- Creswell, John W. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010.
- Fletcher, Jeannine Hill. "Women in Inter-Religious Dialogue." In *The Wiley-Blackwell Companion to Inter-Religious Dialogue*. Chichester: Wiley-Blackwell, 2013.
- Hardiman, F. Budi. *Komersialisasi Ruang Publik Menurut Hannah Arendt Dan Jurgen Habermas*. Yogyakarta: Kanisius, 2010.
- . *Ruang Publik: Melacak Partisipasi Demokratis Dari Polis Sampai Cyberspace*. Yogyakarta: Kanisius, 2020.
- Lapalu, Ester Sonya Ulfartha, and Elizabeth. "Eksistensi Perempuan Di Parlemen: Studi Kesetaraan Gender Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangkaraya," *Wacana: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Interdisiplin* 8, no. 2 (2021): 306-320, DOI: [10.37304](https://doi.org/10.37304)
- Mahmood, S. *Politics of Piety: The Islamic Revival and the Feminist Subject*. Princeton: NJ: Princeton University Press, 2005.
- Mosse, Julia Cleves. *Gender Dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Nelwan, Gerry. "Perempuan Dalam Gerakan Lintas Iman: Agen Perdamaian Di Kota Manado," *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat* 7, no. 1 (2023): 1-12, DOI: <https://doi.org/10.14421/panangkaran.v7i1.3045>
- Palangka Raya satu Data, <https://pasada.palangkaraya.go.id/user/tabeluser/detail/301> (diakses 15 Oktober 2025).
- Pattiasina, Sharon Michelle O. "Huma Batang's Philosophy: Interreligious Harmony and Weaving of National Identity in Palangka Raya," *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 21, no. 1 (2025): 21-30, DOI: <https://doi.org/10.23971/jsam.v21i1.9348>
- Pelaku UMKM, wawancara oleh penulis, Palangka Raya, Indonesia, 10 September 2025.
- Pelatih Tari, wawancara oleh penulis, Palangka Raya, Indonesia, 10 September 2025.
- Pengurus Dekranasda, wawancara oleh penulis, Palangka Raya, Indonesia, 15 September 2025.
- Perwakilan Disperindag Kota Palangka, wawancara oleh penulis, Palangka Raya, Indonesia, 13 September 2025.
- Permanasuri, Ni Putu Diah Agustin. "Persepsi Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Ruang Terbuka Publik Sebagai Kegiatan Olahraga," *Jurnal Ilmiah Sangkareang Mataram* 9, no. 2 (2022): 25-34.

- Pui Lan, Kwok. *Globalization, Gender and Peacebuilding: The Future of Interfaith Dialogue*. New York: Paulist Press, 2011.
- Rahayu, Luh Riniti, and Putu Surya Wedra Lesmana. "Potensi Peran Perempuan Dalam Mewujudkan Moderasi Beragama Di Indonesia," *Jurnal Pustaka* 20, no. 1 (2020): 31-37, DOI: [10.24843/PJIIB.2020.v20.i01.p05](https://doi.org/10.24843/PJIIB.2020.v20.i01.p05)
- Rohmawati, W. S. "The Role of Women in Interreligious Dialogue in Indonesia: A Study on the Forum for Religious Harmony (FKUB)." *Muslim World Journal* 110, no. 4 (2020): 572-588, DOI: <https://doi.org/10.1111/muwo.12362>
- Rohmawati, W. S. A., K. Hamidah, and E. Gayatri. "Integrating Interfaith Dialogue and Economic Empowerment: A Study on Interfaith Women Community Srilili Yogyakarta," *Religio Jurnal Studi Agama-Agama* 11, no. 2 (2021): 139-164, DOI: [10.15642/religio.v11i2.1767](https://doi.org/10.15642/religio.v11i2.1767)
- Sims, Martha, and Martine Stephens. *Living Folklore: An Introduction to the Study of People and Their Traditions*. Logan: Utah State University Press, 2011.
- Supriadi, Yadi. "Relasi Ruang Publik dan Pers Menurut Habermas," *Jurnal Kajian Jurnalis* 1, no. 1 (2017): 1-12, DOI: <https://doi.org/10.24198/jkj.v1i1.12228>